

**PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA DI DESA KEMIRI KECAMATAN
TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I. YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

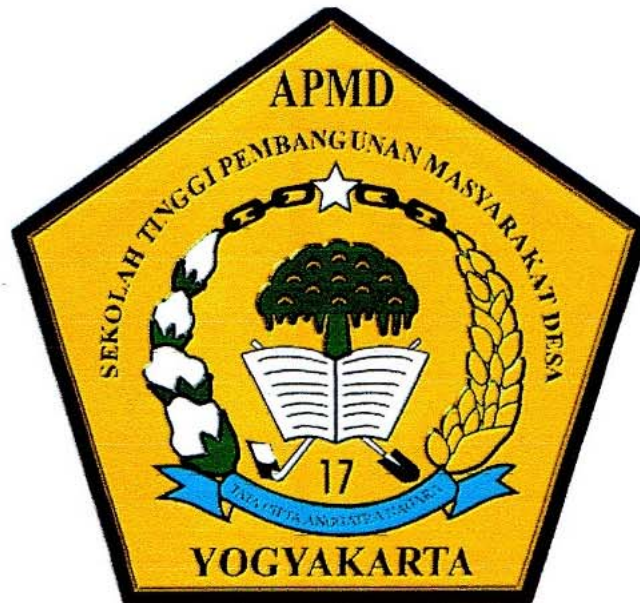
HERY APRIYADI MALO

NIM : 13520025

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA 2018**

**PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA DI DESA KEMIRI KECAMATAN
TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I. YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

HERY APRIYADI MALO

NIM : 13520025

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

YOGYAKARTA



**PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA DI DESA KEMIRI KECAMATAN
TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I. YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Akademik Guna Menyelesaikan
Program Studi Ilmu Pemerintahan Jenjang Kesarjanaan (S-1)



Disusun Oleh :

HERY APRIYADI MALO

NIM : 13520025

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA 2018**






HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 04 April 2018
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD"APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua/Pembimbing Skripsi Drs. Hastowiyono, MS	
2. Penguji Samping I Dra. Tri Daya Rini, M.Si	
3. Penguji Samping II Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si	

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Ilmu Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta



Gugunus Sahdan S.IP, MA

HALAMAN MOTTO

"Tidak semua orang baik itu jujur, tetapi orang jujur
pasti orang baik."

(Samson Satunimus)

"Akulah terang dunia; barang siapa mengikuti Aku, ia tidak
akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan
mempunyai terang hidup."

(Yohanes 8:12)

"Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala
sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang
mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai
dengan rencana Allah."

(Roma 8:28)

"Ora et Labora : Berdoa dan bekerja."

(2 Tesalonika 3:1-15)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati dan segenap jiwa raga, kebahagiaan serta perjuangan mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah menjaga, memberikan kesehatan, dan hikmat bagi penulis sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Yohanes L. Ngongo (Ayah) dan Mariana B. Malo (Ibu) yang telah memberikan dukungan dalam doa, dukungan moril, dan Material, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik.
3. Kepada Yosvina Y. Lende (Kakak), Apriani Lende (Adik), Yeni Nuriyati Lende (Adik) yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan SMA Kristen Waikabubak angkatan 2013 yang memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi.
5. Teman-teman seperjuangan Organisasi Pekaweti Yogyakarta angkatan 2013 yang telah mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi.
6. Keluarga besar Organisasi Pekaweti Yogyakarta yang telah menerima penulis untuk menjadi bagian dalam organisasi dan belajar tentang organisasi.
7. Teman-teman seperjuangan STPMD "APMD" angkatan 2013 yang telah bersama-sama penulis dalam berkuliah dan meberikan semangat dalam pengerjaan skripsi.
8. Kepada yang tersayang Merliana L. M. Pele yang telah menemani penulis dari awal penulisan hingga selesainya penulisan dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang mahasiswa melengkapinya salah satu syarat menyelesaikan Program S1, melalui skripsi dengan judul ***“Pengelolaan administrasi Desa Di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul”***.

Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Habis Muhsin, S.Sos, selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Gregorius Sahdan, S. IP, M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Drs. Hastowiyono, MS, selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan pikiran serta meluangkan waktu guna membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan (S-1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
5. Kepala Desa Kemiri dan Perangkat Desa Kemiri yang telah memberikan izin peneliti untuk penelitian.
6. Keluarga Besar, Yohanes L. Ngongo (Ayah) dan Mariana B. Malo (Ibu) yang telah memberikan dukungan dalam doa, dukungan moril, dan Material, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Juga kepada Yosvina Y. Lende (Kakak), Apriani Lende (Adik), Yeni Nuriyati Lende (Adik) yang telah memberikan motivasi dan semangat.
7. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyusun skripsi.
8. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah bekerjasama dan membantu menyelesaikan pengerjaan skripsi.

Semoga Tuhan memberikan balasan yang terbaik, melimpahkan berkat dan rahmat-Nya atas segala pengorbanan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan tentunya penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki, baik berupa pengalaman maupun teori ilmu, sehingga penyusun sangat berterima kasih atas setiap masukan dan kritik yang disampaikan.

Yogyakarta, 27 Maret 2018

Hery Apriyadi Malo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
INTISARI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Konseptual	4
1. Pemerintah Desa	4
2. Administrasi Desa	8
2.1 Administrasi	8
2.2 Administrasi Desa	11
F. Ruang Lingkup Penelitian	25
G. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Unit Analisis	27
3. Teknik Pengumpulan Data	29
4. Teknik Analisis Data	30
BAB II PROFIL DESA KEMIRI	
A. Deskripsi Wilayah.....	32
1. Keadaan Wilayah	32
2. Keadaan Demografi.....	36
3. Lembaga Pemerintahan	39
BAB III PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA	
1. Administrasi Umum	44
2. Administrasi Penduduk.....	51

3. Administrasi Keuangan Desa	56
4. Administrasi Pembangunan.....	61
5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	64
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

PANDUAN WAWANCARA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Karakteristik informen.....	28
Tabel II.1	Sumber Air Bersih dan Penggunaannya.....	35
Tabel II.2	Jumlah Penduduk	36
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia	37
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	37
Tabel II.5	Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan.....	38
Tabel II.6	Data Tanah Kas Desa	49
Tabel II.7	Data Tanah di Desa	49
Gambar II.1	Peta Desa Kemiri	33
Gambar II.2	Struktur Perangkat Desa Kemiri	39

INTISARI

Desa Kemiri merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. Desa Kemiri saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Baik itu dari pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Pembangunan non fisik Desa Kemiri adalah pembangunan administrasi desa. Pengelolaan administrasi sangat penting bagi setiap desa di Indonesia. Pengelolaan administrasi yang baik akan memperlancar pembangunan desa yang direncanakan. Terlaksananya pembangunan desa desa yang baik juga tidak terlepas dari kinerja perangkat desa yang berkompeten dalam mengelola administrasi desa. Pemerintah desa sebagai administrator dituntut untuk lebih bekerja dengan efisien dalam mengelola administrasi Desa Kemiri. Pemerintah desa yang berkompeten akan sangat mempengaruhi dalam pengelolaan administrasi desa karena pengelolaan administrasi desa merupakan tanggungjawab dari pemerintah desa. Obyek penelitian adalah pengelolaan administrasi desa di Desa Kemiri. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengelolaan administrasi desa di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menuliskan peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang ada sekarang berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil di lapangan sesuai dengan judul yang diambil pada penelitian ini yaitu tentang gambaran pengelolaan administrasi desa di Desa Kemiri. Kemudian cara menentukan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kemiri yang menurut peneliti sudah memadai untuk dijadikan informan dan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati (observasi), mewawancarai dengan mendalam (interview) dan mendokumentasikan data yang terdapat di tempat penelitian. Tahap analisis data yang dilakukan dengan cara data dikumpulkan, data diidentifikasi, data direduksi, dan diinterpretatif.

Dari hasil penelitian, sudah menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi desa di Desa Kemiri sudah baik, hal ini terbukti dari kelengkapan data administrasi Desa Kemiri dari setiap perangkat desa yang bekerja mengelola data administrasi desa. Hal ini tidak terlepas dari kinerja yang bagus dari perangkat desa dalam bekerja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi, yaitu melibatkan semua perangkat desa dalam pengelolaan administrasi desa, dengan maksud agar semua perangkat desa dapat berkontribusi terhadap pengelolaan administrasi desa.

Kata kunci: Pengelolaan, Administrasi, Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal (9) huruf a, dan huruf b, mengamanatkan bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.

Pemerintah desa berhak mengatur dan merencanakan pembangunan desa untuk kemajuan desa dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa dan menyusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota. Pembangunan desa yang dimaksud disusun oleh pemerintah desa dan partisipasi seluruh masyarakat desa.

Dalam pembangunan desa, pemerintah desa dan perangkat desa bekerja untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal ini dijelaskan pada Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 26 Ayat (1), dengan demikian pemerintah desa merupakan ujung tombak dari pembangunan.

Terlaksananya pembangunan desa yang baik, tidak terlepas dari kinerja pemerintah desa beserta aparat desa yang berkompeten dalam mengelola administrasi desa. Pemerintah desa dan aparat desa adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan.

Untuk lebih meningkatkan manajemen pemerintah desa perlu dilakukan penataan atau pengelolaan administrasi desa yang baik benar, agar lebih efektif dan efisien. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar – benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pengelolaan administrasi desa yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Nurcholis (2011:135) menyatakan bahwa administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa, sehingga data – data tentang masyarakat setempat tidak kurang dan melalui pengelolaan administrasi pemerintahan desa diharapkan mampu untuk melengkapi administrasi desa, agar upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa menjelaskan tentang Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan berwenang menyelenggarakan Administrasi Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa. Administrasi Desa dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian sudah jelas bahwa betapa pentingnya pengelolaan administrasi desa dalam pembangunan desa.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 menjelaskan tugas Kepala Desa, yaitu : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 27 menjelaskan Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban. Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah memperjelas pentingnya pengelolaan administrasi desa yang harus dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Dalam penelitian ini, administrasi desa yang dimaksud adalah kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti mencoba untuk mengaitkan dengan keadaan riil di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul sebagai tempat penelitian, menurut peneliti dari pengamatan awal, menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Desa Kemiri dalam pengelolaan administrasi desa dan penyediaan informasi tentang desa hasilnya masih terbilang belum cukup baik. Hal ini terbukti dari profil desa tahun 2013 belum pernah diperbaharui hingga tahun 2018 dan data yang seharusnya di masukan dalam profil desa, tidak dimasukan dalam profil desa. Sehingga peneliti tertarik untuk kembali meneliti tentang pengelolaan administrasi desa di Desa Kemiri, agar permasalahan tentang administrasi desa di Desa Kemiri betul – betu diketahui oleh peneliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat ditarik satu masalah yang dapat dirumuskan dalam rumusan masalah ini, sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negara Indonesia* (Sanri). Bumi Aksara.

Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga.

Sondang P. Siagian, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Penerbit Rineka Cipta.

Sudaryono. *Metode Penelitian*. Rajawali Pera Divisi Buku Perguruan Tinggi. PT Rajawaligrafindo Persada Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana, 2007, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Mandar Maju.

Taliziduhu Ndraha. *Konsep Administrasi Dan Administrasi Di Indonesia*. Bina Aksara.

Wemphy Banga, *Kajian Administrasi Publik Kontemporer*. Konsep, Teori dan Aplikasi Unhalu Press.

eJournal Ilmu Pemerintahan 3 (3), 2015: 1448-1459 ISSN 0000-0000 ,
ejournal.ip.fisip-unmul.org.

E-Jornal-Suhana-NIM-100565201399.

eJournal Administrasi Negara, Volume 4 , Nomor 4 , 2016: 5062 - 5076 ISSN
0000-0000. ejournal.an.fisip-unmul.ac.id

Jurnal IT CIDA Vol 1 No. 1 Desember 2015 43 ISSN: 2477-8133 e-ISSN: 2477-8125. 1166 ID-efektivitas-penyelenggaraan-tertib-administrasi-pemerintahan-desa-tempang-tiga
artikelCC2B32E0386FC831DFCF697C11569FA0.

Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325].

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.